

Media Cetak	Harian Fajar
Tanggal	Senin 11 November 2024
Wilayah	Kabupaten Bone



Petani Meradang Kena Pungli

Petani Meradang Kena Pungli

Kasus Bantuan Alsintan Berbayar

REPORTER ASHARI P. NEGARA - ARINI
EDITOR RIDWAN MARZUKI - M TAKDIR RIDWAN

BONE, FAJAR — Petani di Bone meradang. Bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan) kena pungutan liar (pungli) oknum.

SEJUMLAH alsintan yang diperuntukkan untuk petani itu merupakan bantuan presiden dan Kementerian Pertanian (Kementan). Bantuan itu diduga dimanfaatkan oknum di kecamatan untuk menarik pungli.

Bantuan yang seyogyanya gratis bagi para kelompok tani,

malah dikenakan biaya bervariasi. Para petani yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Bontocani menggeruduk Kantor DPRD Bone, Jumat, 8 November 2024. Mereka mendesak kasus pungli ini diproses.

|| Baca Petani... Hlm 3

Petani Meradang Kena Pungli

|| Lanjutan Halaman 1

Anggota Komisi II DPRD Bone Andi Idris Alang mengatakan pemanggilan akan dilakukan kepada para distributor, pihak kantor kecamatan, dan perwakilan petani untuk menyelesaikan persoalan ini.

"Setelah pulang Bimtek kami akan rekomendasikan untuk panggil pihak terkait untuk menyelesaikan persoalan ini," ujar Idris pada audiensi anggota DPRD Bone dan petani di ruang rapat Badan Anggaran (Banggar).

Selain persoalan Alsintan, petani juga menuntut agar distribusi pupuk ini tak dipermankan. Petani melaporkan di Kecamatan Bontocani, harga pupuk malah digelembungkan di atas harga eceran tertinggi (HET).

Selain itu pupuk juga sangat langka dan sulit ditemukan. Padahal Kementan telah melaporkan adanya penambahan bantuan pupuk yang diklaim surplus di Bone.

"Ini membingungkan, kenapa ada kecamatan satu, kuota (pupuk) tidak cukup. Di kecamatan lain itu pupuknya sudah melebihi kuota yang diharap-

kan. Sekarang seharusnya terbaik, dulu petani cari pengecer, sekarang seharusnya pengecer yang cari petani untuk habiskan kuota," jelasnya.

Idris mengatakan pihaknya telah melakukan pertemuan dengan Dinas Pertanian Bone. Pengakuan mereka, masalah ini tidak benar. FAJAR yang coba mengonfirmasi masalah ini ke Dinas Pertanian Bone masih belum mendapat respons.

Sementara itu perwakilan massa aksi, Abdul Rahman mengatakan para petani cukup geram, sebab petani kerap diminta Rp600 ribu untuk bisa menikmati bantuan alsintan berupa pompa air.

"Nilainya Rp600 ribu untuk dapat bantuan pompa air dari Kementan," sesal Rahman.

Pupuk juga demikian. Distribusinya tak merata dan sangat sulit didapatkan.

"Keluhan kami juga terkait para pengecer pupuk ini, mereka memperjualbelikan harga pupuk di atas harga eceran tertinggi. HET-nya itu Rp105 ribu, sementara kami diperjualbelikan sekira Rp150 ribu," sambungnya.

"Kami juga sering tidak mendapatkan jatah pupuk di kampung kami karena pengecer berdalih pupuk itu untuk kampung lain," ujarnya.

Jaksa Mengusut

Sebelumnya Kejari Bone telah mengumpulkan saksi dan keterangan dari pihak terkait pungutan liar ini. Pungutan kepada petani telah dibenarkan oleh kelompok tani serta Penyuluh Pertanian, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (DPHP).

Kejari pun melakukan penyelidikan dengan melayangkan pemanggilan salah satu kades terkait masalah pungli ini. Hanya saja pihak terkait tak datang. Hal ini dibenarkan salah satu S, Kades Timurung di Kecamatan Ajangale.

"Saya dihubungi pihak kejaksaan untuk diminta keterangan tapi saya di Makassar sedang sakit, jadi tidak hadir," jelasnya beberapa waktu lalu.

Kasus dugaan pungli bantuan alsintan ini memang telah diatensi langsung oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Bone untuk mengusutnya.

Kejari melaporkan

pungutan yang dilakukan bahkan mencapai Rp3 juta per unit dari pengakuan kelompok tani, beserta tim penyuluh pertanian Dinas Pertanian, Holtikultura, dan Perkebunan (DPHP) Bone.

Kasus Maros

Hal serupa terjadi di Maros. Petani mengeluhkan pungutan untuk mendapatkan bantuan traktor. Salah seorang petani di Kecamatan Bantimurung yang meminta namanya tak dikorbankan mengaku pada 2017 dirinya ditawarkan bantuan traktor oleh oknum UPTD Agribisnis Pertanian.

"Jadi pertama itu kita ditawarkan bantuan traktor, tapi bayar Rp5 jutaan. Katanya cuma sekali saja membayar. Belakangan ada lagi penagih katanya kita harus bayar Rp1,5 juta per panen," katanya.

Karena petani tidak mampu membayar, akhirnya nilainya diturunkan menjadi Rp650 ribu per panen. "Itu saja kita masih berat sebetulnya, tapi daripada traktor diambil makanya kita bayar saja," akunya.

Bahkan hingga saat ini masih kerap ditagih oleh oknum tersebut. "Masih

ditagih lagi Rp650 ribu. Kita tidak tahu kapan selesai ini pembayarannya," sebutnya.

Dia menjelaskan sistem bantuan ini diperuntukkan bagi kelompok tani. Namun, biasanya bantuan itu akan dimiliki oleh ketua ataupun anggota yang bisa menebus alat terse-

but. "Jadi nanti kalau ada orang lain yang mau pakai mereka bisa bayar uang solarnya saja," katanya.

Sementara untuk bantuan pompa air, tidak dikenakan biaya. "Kalau pompa tidak ada, cuma biasa ada yang kasih Rp200 ribu, katanya sebagai tanda terima

kasih saja," akunya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Maros, Fadli mengatakan saat ini sudah tak ada bantuan traktor ataupun mesin lainnya. "Kalau itu (pungli) di luar kewenangan kami, karena biasa ada LO-nya (penghubung) langsung," sebutnya. (an-rin/zuk)